



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2019

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian



<https://kominfo.kotabogor.go.id>



Jl. Ir. H. Juanda No 10 Kota Bogor

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor Tahun 2019.

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggungjawaban keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja sehingga diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor dalam memenuhi aspirasi masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor Tahun 2019 merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, dan realisasi pencapaian indikator kinerja serta sasaran dengan target yang telah ditetapkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menginformasikan gambaran kinerja yang telah dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi sepanjang Tahun Anggaran 2019 dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor Tahun 2019.

Semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan sebagai tolak ukur dalam menyusun strategi kebijaksanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dimasa yang akan datang untuk lebih meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan pelaksanaan *e-Government* di Kota Bogor.

Bogor, Desember 2019
Kepala Dinas,



Drs. Firdaus, M.Si
NIP. 19671226 198603 1 002

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pemanfaatan Informasi dan Komunikasi telah menjadi tren baru bahkan merambah kepada tata kelola pemerintahan, bahkan dikuatkan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional pengembangan *e-Government*. Dengan data pemerintahan yang dikelola secara elektronik diharapkan teknik pengumpulan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan memberikan dukungan terhadap pengambilan keputusan secara cepat dan akurat.

Pemerintah daerah berperan secara optimal dengan berusaha melakukan akselerasi dengan memanfaatkan teknologi dalam menyikapi kondisi kekinian dengan menerapkan konsep *smart city*.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor merupakan salah satu dinas yang menangani urusan wajib bukan pelayanan dasar dibidang komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian yang mempunyai peran strategis sebagai leading sektor dalam implementasi *smart city* berusaha mewujudkan komitmen, peran dan pengabdian dalam mendorong percepatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi tata kelola pemerintah daerah serta memberi layanan prima kepada masyarakat dan menjadikan Kota Bogor sebagai *smart city* sebagai upaya peningkatan layanan terhadap masyarakat.

Keberadaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor ditujukan untuk percepatan penyampaian informasi dan mendukung pelayanan publik melalui pengembangan TIK, dengan menetapkan kebijakan pembangunan infrastruktur secara bertahap, pengembangan aplikasi, penyebaran informasi publik,

bimbingan teknis Sumber Daya Manusia dan kajian kelembagaan serta melakukan kerjasama kemitraan dengan beberapa pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan Misi Pertama Kota Bogor, yaitu *“Mewujudkan Bogor Kota yang Cerdas dan Berwawasan Teknologi Informasi”*.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor termasuk ke dalam Dinas Tipe A yang terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, membawahkan:

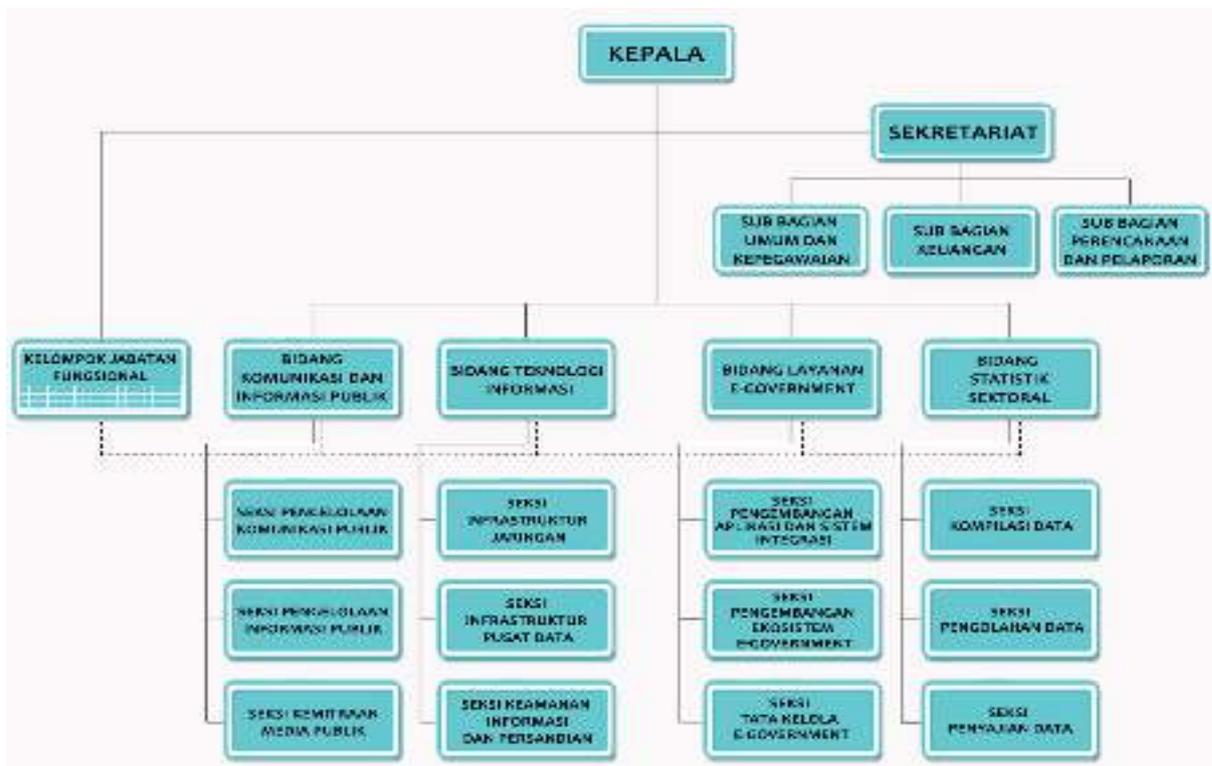
1. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
3. Seksi Kemitraan Media Publik.

d. Bidang Teknologi Informasi, membawahkan:

1. Seksi Infrastruktur Jaringan;
2. Seksi Infrastruktur Pusat Data;
3. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian.

- e. **Bidang Layanan e-Government**, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Sistem Integrasi;
 2. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government;
 3. Seksi Tata Kelola e-Government.
- f. **Bidang Statistik Sektoral**, membawahkan:
 1. Seksi Kompilasi Data;
 2. Seksi Pengolahan Data;
 3. Seksi Penyajian Data.
- g. **Kelompok Jabatan Fungsional**.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
(Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah)**



Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bogor

1. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 97 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

a. Tugas

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pengelolaan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- e. pelaksanaan teknis operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
14. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 97 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor;
15. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 95 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor didasarkan atas visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas yang telah dicantumkan pada dokumen Rencana Strategis 2015-2019. Dokumen Renstra tersebut telah disusun dengan mengakomodir kondisi dan kebutuhan dalam pencapaian tata kelola *e-Government* dan *Smart City* untuk mewujudkan misi pertama Kota Bogor.

A.1. Visi dan Misi

Visi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor tidak terlepas dari visi Pemerintah Kota Bogor yaitu "*Kota Bogor yang Nyaman, Beriman, dan Transparan*".

Penetapan visi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bogor berdasarkan pada tugas dan fungsi dinas yaitu "Pengelolaan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian".

Dalam kurun waktu 2015-2019 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor hendaknya mampu mendukung pelaksanaan akselerasi Pembangunan Daerah yang tertuang di dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019.

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, disamping itu visi ini juga merupakan panduan dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan.

1. Visi

Berdasarkan uraian diatas, visi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor yaitu:

"Terwujudnya Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan prima bagi masyarakat"

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dinas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor dengan mengacu pada Misi Kesatu Pemerintah Kota Bogor yaitu *"Mewujudkan Bogor Kota yang Cerdas dan Berwawasan Teknologi Informasi"*.

Dalam mendukung Misi Kesatu tersebut, maka disusunlah misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor sebagai berikut :

Misi 1 : *Mewujudkan lingkungan masyarakat Kota Bogor yang cerdas dan dinamis dalam persaingan lokal dan global dengan wawasan TIK;*

Misi 2 : Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance dalam meningkatkan mutu pelayanan publik.

A.2. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan visi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor Tahun 2015-2019 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misinya. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kinerja setiap tahunnya.

Adapun Tujuan dan Sasaran dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sebagai berikut:

MISI 1. Mewujudkan lingkungan masyarakat Kota Bogor yang cerdas dan dinamis dalam persaingan lokal dan global dengan wawasan TIK.

Tujuan 1.1. : Peningkatan kualitas *smart government*

Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas (*smart governance*)

Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya kualitas infrastruktur TIK

Sasaran 1.1.3 : Meningkatnya integrasi data sistem informasi

MISI 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance dalam meningkatkan mutu pelayanan publik.

Tujuan 2.1. : Pengembangan dan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dalam mendukung Keterbukaan Informasi Publik

Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya pelayanan informasi dan komunikasi

Tujuan 2.2. : Peningkatan Manajemen Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional

Sasaran 2.2.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas

A.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor, diperlukan langkah-langkah strategi dan kebijakan. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan yang dirumuskan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS		STRATEGI	KEBIJAKAN
1.1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas (<i>smart governance</i>)	Meningkatkan penerapan dan peningkatan kualitas layanan <i>e-government</i> pada layanan publik	Penetapan regulasi dan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan <i>e-government</i>
1.1.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur TIK	Penyediaan prasarana dan sarana infrastruktur TIK yang berkualitas	Standarisasi prasarana dan sarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
1.1.3	Meningkatnya integrasi data sistem informasi	Melakukan pengelolaan Sistem Informasi yang terintegrasi	Mengembangkan Sistem Informasi terintegrasi yang dapat menciptakan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat
2.1.1	Meningkatnya pelayanan informasi dan komunikasi	Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik melalui peningkatan layanan saluran informasi dan komunikasi publik	Pemanfaatan saluran informasi dan komunikasi publik sebagai sarana aspirasi masyarakat

SASARAN STRATEGIS		STRATEGI	KEBIJAKAN
2.2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas	Menciptakan tata kelola profesional dengan tertib administrasi dan pemenuhan kebutuhan dasar administrasi perkantoran	Meningkatkan operasional administrasi perkantoran yang efektif dan efisien

Tabel 4.3

Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor merupakan dokumen pernyataan kinerja antara Wali Kota Bogor dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor untuk mewujudkan target kinerja melalui pelaksanaan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaian baik berupa hasil ataupun manfaat.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Wali Kota dan Kepala Dinas atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas dan fungsi serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak terbatas pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berjalan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

**C. MATRIKS PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BOGOR
TAHUN 2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas (smart governance)	indeks e-government	3,29	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	
				Penyelenggaraan Pelatihan bagi SDM TIK seluruh OPD	8.829.000
				Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
				Pengembangan dan Pengelolaan e-Government	795.250.000
				Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor	48.493.000
				Penyusunan Regulasi TIK (Perwali, SOP)	1.429.550
				Penyelenggaran Ekosistem TIK dan Kerjasama Smartcity	38.600.000
				Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik Berbasis Elektronik	11.660.000
				Penilaian Index E-Government Indonesia	33.588.200
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur TIK	Persentase Penyediaan infrastruktur Jaringan Internet dan intranet menggunakan Fiber Optik	80%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
				Pengadaan BANDWIDTH	2.500.000.000
				Pemeliharaan jaringan intranet dan internet (BACKBONE) Kota Bogor	669.936.800
				Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota	772.327.400
				Pemeliharaan Wifi Ruang Publik	74.349.750

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
				Pemeliharaan Grounding Listrik dan Erester OPD dan Kelurahan	74.425.000
				Pembangunan Wifi Ruang Publik	59.262.000
				Pengadaan Infrastruktur Data Center	295.782.000
				Pemeliharaan dan pengelolaan Infrastruktur Data Center	381.170.450
				Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian	136.608.000
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Teleconference Pemerintah	69.995.000
				Persentase CCTV yang diintegrasikan	96%
		Pemeliharaan dan Pengembangan CCTV dan Multimedia Kota Bogor	353.273.510		
3	Meningkatnya integrasi data sistem informasi	Persentase Integrasi Data SIM	20,39	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
				Pengembangan dan Pembuatan data Warehouse	36.040.000
				Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room	297.144.000
				Digitalisasi Profil Kota Bogor	29.551.350
				Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kota (SIMATA)	50.540.000
				Penyelenggaraan Statistik Sektor	4.378.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
4	Meningkatnya pelayanan informasi dan komunikasi	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti PD Terkait	70%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
				Penyelenggaraan Streaming Radio Sipatahunan	95.717.000
				Penyelenggaraan siaran Televisi dan Streaming TV Sipatahunan	153.617.000
				Pengelolaan Contact Center Pengaduan Masyarakat	1.322.800.000
				Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik	47.200.000
				Pengembangan Aplikasi Data Base Komunikasi	35.450.000
				Penyelenggaraan Diseminasi dan Kemitraan Media Publik	63.417.000
				Pengadaan Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat	88.200.000
				Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	
				Pelatihan Aplikasi Pengaduan Masyarakat	12.400.000
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas	Nilai Akuntabilitas kinerja Dinas	B	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	14.000.000
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
				Pengelolaan Rumah Tangga OPD	885.502.579

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
				Pengadaan Inventaris Kantor	335.950.000
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor	73.353.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung jawabkan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor yang merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang telah ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA

Dari 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian sasaran menurut indikator yang telah ditetapkan kami uraikan sebagai berikut:

MISI 1. Mewujudkan lingkungan masyarakat Kota Bogor yang cerdas dan dinamis dalam persaingan lokal dan global dengan wawasan TIK.

Tujuan 1.1. : Peningkatan kualitas *smart government*

Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas (*smart governance*)

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
indeks e-government	3,21	3,10	96,6%

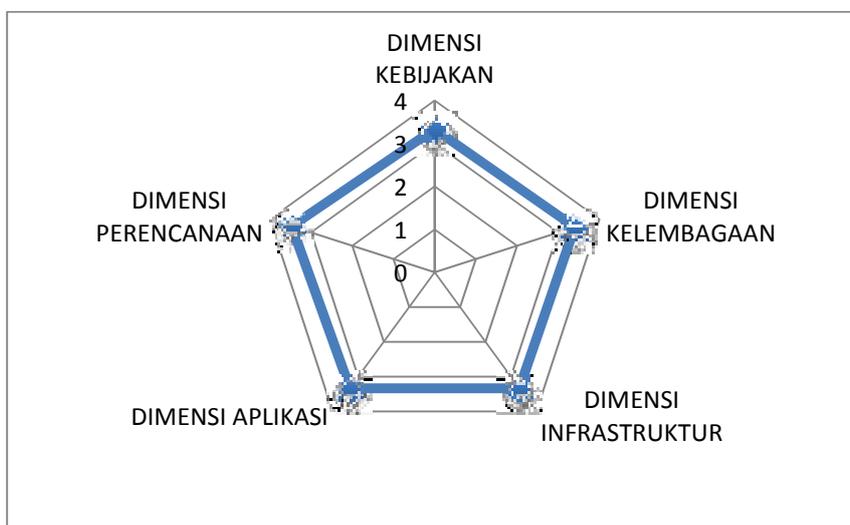
1. Penjelasan hasil Penilaian Indeks e-Government

Hasil *Assesment* Kota Bogor Tahun 2019 oleh Tim Assessor Kemkominfo menunjukkan hasil pemeringkatan *e-Government* dengan nilai rata-rata seluruh dimensi adalah **3,10 (tiga koma satu nol)** dan termasuk dalam **kategori BAIK**.

Kota	DIMENSI					RATA-RATA	KATEGORI
	KEBIJAKAN	KELEMBAGAAN	INFRASTRUKTUR	APLIKASI	PERENCANAAN		
Bogor	3.23	2.93	3.00	3.30	3.03	3.10	BAIK

Tabel Hasil Pemeringkatan PeGI 2019 Kota Bogor

Penilaian ini dilakukan berdasarkan informasi yang didapat dari hasil pemaparan peserta asesmen dan penggalian asesor selama pelaksanaan asesmen. Disamping itu penilaian juga mengacu pada indikator yang tersedia pada saat penilaian dilaksanakan.



Gambar Grafik Lima Dimensi Kota Bogor

Adapun pemberian peringkat di masing-masing dimensi dan secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

3,50 ≤ SANGAT BAIK ≤ 4,00

2,50 ≤ BAIK < 3,50

1,50 ≤ KURANG < 2,50

1,00 ≤ SANGAT KURANG < 1,50

Berikut ini diuraikan penilaian penerapan *e-Government* pada Kota Bogor berdasarkan masing-masing dimensi.

✓ **Kebijakan**

Hasil asesmen dimensi Kebijakan menunjukkan hasil yang BAIK. Dengan indikator positifnya adalah:

1. *e-leadership* dinilai baik dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Informatika dan Komunikasi;
2. Prioritas sudah dilakukan dengan terstruktur dari sisi infrastruktur, aplikasi dan kebijakan. Pemanfaatan TIK merupakan salah satu strategi yang diprioritaskan untuk mengeksekusi kebijakan yang ingin menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan TIK. Misi ini memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public berjalan efektif dan efisien;
3. Ada usaha menghilangkan “silo-silo” kegiatan, dimana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bogor menjadi sentral terkait kebijakan dan implementasi TIK di Kota Bogor, pemilik bisnis proses akan berkoordinasi dengan Diskominfostandi ketika akan mengembangkan Aplikasi, penyediaan jaringan internet, dll.

✓ **Kelembagaan**

Hasil asesmen pada saat penilaian untuk dimensi Kelembagaan secara umum menunjukkan hasil yang BAIK. Indikator positifnya adalah:

1. Adanya struktur organisasi Diskominfostandi yang didasari Peraturan Walikota Bogor Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
2. Dari segi Jumlah SDM berkompetensi TIK yang terinventarisir sudah memadai untuk mendukung tugas dan fungsi Kota Bogor yang memerlukan teknologi informasi dan komunikasi yang andal dan aman;
3. Sudah memiliki beberapa SOP, tetapi mengingat semakin meningkatnya kompleksitas proses bisnis yang ditangani, SOP maupun pengaturan pelaksanaan kegiatan TIK perlu dilengkapi;
4. Sudah menyediakan anggaran untuk peningkatan kompetensi SDM di bidang TIK. Selain mengikuti pelatihan dan bimtek, SDM Diskominfostandi juga mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dengan instansi lain yang memberikan materi terkait TIK.

✓ **Infrastruktur**

Nilai dimensi Infrastruktur adalah BAIK. Asesor menemukan indikator positif terkait dimensi infrastruktur serta tata kelolanya yaitu antara lain:

1. Kota Bogor sudah memiliki jaringan data antar Perangkat Daerah dan Kelurahan serta beberapa Puskesmas dengan 88 titik (FO) DAN 25 wireless dengan bandwidth 300 Mbps;
2. Sudah tersedia SOP Pemantauan Jaringan, namun yang perlu dipertimbangkan adalah untuk dapat melengkapinya dengan penanganan jaringan diluar jam kerja;

3. Salah satu bentuk tata kelola infrastruktur sudah ditunjukkan dengan jalan memusatkan akses internet sehingga pemanfaatannya optimal. Hal ini akan berpengaruh terhadap pengukuran kinerja (misalkan distribusi kepadatan jalur), penghematan peralatan, serta memudahkan perawatan.

✓ **Aplikasi**

Hasil asesmen pada saat penilaian untuk dimensi Aplikasi secara umum menunjukkan hasil yang BAIK. Indikator positifnya adalah:

1. Pengelolaan bogorkota.go.id sudah baik, sudah melibatkan satker lain untuk melakukan perbaruan konten. Dengan tampilan yang sudah mengedepankan layanan bagi masyarakat yang butuh akan informasi;
2. Sudah tersedia fasilitas untuk publik yang ingin berinteraksi dengan pemerintah dalam bentuk *channel* pengaduan. Penyediaan akses publik terhadap layanan pemerintah melalui web layak diapresiasi seperti *Report LPSE*, *Perizinan*, maupun *Pajak Online*;
3. Adanya berbagai aplikasi fungsional untuk mendukung fungsi dan peran Kota Bogor yang cukup lengkap dan sudah meningkatkan pemanfaatan teknologi terbuka (*opensource*) dalam pengembangan berbagai aplikasi yang dioperasikan.
4. Beberapa aplikasi sudah punya kemampuan berintegrasi dengan aplikasi lain, seperti perizinan dan PBB online. Diharapkan ada target, misalnya semua aplikasi perizinan

✓ **Perencanaan**

Hasil asesmen pada saat penilaian untuk dimensi Perencanaan secara umum menunjukkan hasil yang BAIK. Indikator positifnya adalah:

1. Tersedia Buku Rencana Pengembangan *e-Government* 2014-2019. Hasil review Rencana Induk Pengembangan *e-Government* yang dilakukan ditahun 2018 diharapkan menjadi acuan pembuatan Buku Rencana Induk berikutnya;

2. Dalam mekanisme menyusun perencanaan TIK, melibatkan beberapa unsur PD menjadi tim teknis. Personal yang terlibat adalah:
 - a. Kepala Dinas KominfoStandi;
 - b. Kasubag.TU;
 - c. Para Kepala Bidang DiskominfoStandi;
 - d. Para Kepala Seksi DiskominfoStandi;
 - e. Pengelola TIK;
 - f. PD lain yang menjadi tim teknis.
3. Memiliki anggaran untuk pengembangan dan implementasi TIK serta penguatan kompetensi SDM TIK yang sudah mencukupi untuk saat ini.

Analisis penyebab ketidak berhasil mencapai target tahun 2019:

1. Kebijakan

1. Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi informasi harus dapat terjaga keberlangsungannya;
2. Pengembangan kebijakan;
3. Fungsi CIO dan Komite TIK tidak optimal;
4. Belum adanya Audit teknologi informasi (IT Audit) dengan pihak independen yang kompeten;
5. Melengkapi kebijakan-kebijakan yang belum dirumuskan/ditetapkan.

2. Kelembagaan

1. Untuk "menjaga" SOP belum adanya Management Review secara berkala;
2. Belum adanya sertifikasi kompetensi yang dapat berupa sertifikasi lokal maupun sertifikasi internasional.

3. Infrastruktur

1. Infrastruktur masih kurang memadai, khususnya di Data Center;
2. Dalam memberikan layanan TIK antar Perangkat Daerah dan Kelurahan serta beberapa Puskesmas masih kurang optimal;

3. Belum adanya arsitektur infrastruktur TIK Kota Bogor yang mengacu kepada perkembangan teknologi, regulasi dan *best practice*.

4. Aplikasi

1. Penggunaan command center kurang optimal;
2. interoperabilitas internal dan eksternal masih belum optimal;
3. Keamanan sistem aplikasi masih belum terjamin.

5. Perencanaan

1. Belum adanya Rencana Induk Pengembangan *e-Government* yang baru;
2. Anggaran untuk pengembangan dan implementasi TIK masih sangat minim.

2. Penjelasan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

Diskominfostandi Kota Bogor pada tahun 2019 telah memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2019 Diskominfostandi Kota Bogor telah melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dengan dilaunchingnya Aplikasi SiBadra oleh Wali Kota Bogor pada tanggal 28 April 2019. SiBadra yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran merupakan aplikasi yang mengintegrasikan pengaduan masyarakat antara Call Center dan NTPD 112 untuk melayani masyarakat selama 24 jam yang dapat dilakukan melalui smartphone android. Sampai saat ini telah dilakukan pengembangan aplikasi agar dapat digunakan untuk smartphone berbasis IOS.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (apabila ada)

Sampai saat ini Standar Nasional untuk Pengembangan IT belum ada.

4. Analisis program dan kegiatan atau upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai kinerja

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Diskominfostandi dalam rangka mencapai kinerja selama tahun 2019 adalah :

- Pengadaan Bandwidth;
- Pemeliharaan jaringan intranet dan internet (*Backbone*) Kota Bogor;
- Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota;
- Pemeliharaan Wifi Ruang Publik;
- Pemeliharaan Grounding Listrik dan Erester OPD dan Kelurahan;
- Pengembangan dan Pengelolaan e-Government;
- Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor;
- Pengembangan dan Pembuatan data Warehouse;
- Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room;
- Digitalisasi Profil Kota Bogor;
- Penyelenggaraan Streaming Radio Sipatahunan;
- Penyelenggaraan siaran Televisi dan Streaming TV Sipatahunan;
- Pengadaan Infrastruktur Data Center;
- Pemeliharaan dan pengelolaan Infrastruktur Data Center;
- Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kota (SIMATA);
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Teleconference Pemerintah;
- Pengelolaan Contact Center Pengaduan Masyarakat;
- Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
- Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik;
- Pengembangan Aplikasi Data Base Komunikasi;
- Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian;
- Penyusunan Regulasi TIK (Perwali, SOP);
- Pemeliharaan dan Pengembangan CCTV dan Multimedia Kota Bogor;
- Penyelenggaraan Diseminasi dan Kemitraan Media Publik;
- Pembangunan Wifi Ruang Publik;

- Pengadaan Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat;
- Penyelenggaran Ekosistem TIK dan Kerjasama Smartcity;
- Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik Berbasis Elektronik;
- Penilaian Index *e-Government* Indonesia;
- Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- Penyelenggaraan Pelatihan bagi SDM TIK seluruh OPD;
- Pelatihan Aplikasi Pengaduan Masyarakat.

5. Alternatif solusi untuk mencapai target pada tahun 2020

Seiring dengan terbitnya RPJMD dan Renstra baru periode 2019-2024 dengan capaian target baru untuk pelaksanaan program dan kegiatan 5 (lima) tahun ke depan, solusi untuk mencapai target RPJMD 2019-2014 dan Renstra 2019-2024 diantaranya dengan:

- Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep *Good Governance* untuk mencapai peningkatan hasil evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
- Peningkatan layanan pengaduan masyarakat melalui Aplikasi SiBAAdra dengan melakukan sosialisasi kepada Perangkat Daerah untuk selalu memberikan respon yang cepat terhadap pengaduan yang masuk.
- Memaksimalkan potensi portal satu data sebagai aplikasi sumber data dan informasi statistik sektoral bagi kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah;
- Peningkatan tata kelola keamanan informasi untuk mencapai peningkatan hasil evaluasi Indeks KAMI (Keamanan Informasi).
- Menyelenggarakan keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengembangan dan pemanfaatan TIK melalui:
 - Pembentukan organisasi struktural yang lengkap sehingga dapat menjalankan fungsi *Chief Information Officer* (CIO);

- Peningkatan program pengembangan SDM TIK yang terencana dan terlaksana.
- Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK yang terdiri dari :
 - Data Center dan aplikasi pendukungnya;
 - Fasilitas pendukung seperti AC, UPS, Genset serta sarana pengamanan fasilitas lainnya;
 - Dokumen *Disaster Recovery* yang diperlukan jika terjadi kegagalan system;
 - Pemeliharaan Infrastruktur TIK;
 - Inventarisasi peralatan TIK.
- Pengembangan Aplikasi-aplikasi yang mendukung fungsi dasar umum sistem pemerintahan, yang terdiri antara lain :
 - Pelayanan Publik;
 - Administrasi dan Manajemen Umum;
 - Administrasi Legislasi;
 - Manajemen Pembangunan;
 - Manajemen Keuangan;
 - Manajemen Kepegawaian.

Tujuan 1.1. : Peningkatan kualitas *smart government*

Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya kualitas infrastruktur TIK

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Penyediaan infrastruktur Jaringan Internet dan intranet menggunakan Fiber Optik	80%	66%	82,5%

Penyediaan infrastuktur jaringan internet dan intranet Kota Bogor dititik beratkan pada pengadaan jaringan *Fiber Optik* (FO) yang telah dilaksanakan secara bertahap dimana jaringan *Fiber Optik* (FO) ini adalah untuk mengganti *wireless* yang selama ini rentan terhadap cuaca dan lebih menstabilkan jaringan intranet dan internet. Adapun penyediaan infrastruktur jaringan yang terpasang sampai dengan tahun 2019 sebanyak 88 (delapan puluh delapan) titik jaringan fiber optik dari rencana pemasangan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) titik yang terkoneksi internet di Kota Bogor sampai tahun 2019. Adapun 93 (Sembilan puluh tiga) titik yang telah terpasang diantaranya sebagai berikut:

No	Titik FO
1	Kecamatan Bogor Barat
2	Kelurahan Cilendek Barat
3	Kelurahan Cilendek Timur
4	Kelurahan Gunung Batu
5	Kelurahan Pasir Jaya
6	Kelurahan Pasir Kuda
7	Kelurahan Pasir Mulya
8	Kecamatan Bogor timur
9	Kecamatan Bogor Utara
10	Kelurahan Cimahpar
11	Kelurahan Tegal Gundil
12	Kecamatan Bogor Selatan
13	Kelurahan Batu Tulis
14	Kelurahan Cipaku
15	Kelurahan Empang
16	Kecamatan Bogor Tengah
17	Kelurahan Babakan Pasar
18	Kelurahan Cibogor
19	Kelurahan Kebon Kalapa
20	Kelurahan Pabaton
21	Kelurahan Paledang
22	Kelurahan Panaragan
23	Kecamatan Tanah Sareal
24	Kelurahan Kayumanis
25	Kelurahan Kedung Badak

No	Titik FO
26	Kelurahan Kedung Jaya
27	Kelurahan Sukadamai
28	Kelurahan Tanah Sareal
29	Dinas Pendidikan
30	Dinas Kesehatan
31	Dinas Sosial (ex Disnakersos)
32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (ex BPLH)
33	Dinas Ketahanan Pangan
34	Dinas Lingkungan Hidup
35	Dinas Pemuda dan Olahraga
36	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
39	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
40	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
41	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (ex BPMKB)
42	Dinas Perhubungan (DLLAJ)
43	Dinas KUKM
44	Dinas Pertanian
45	Dinas Perumahan dan Permukiman
46	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
47	Badan Perencanaan Keuangan Daerah
48	Inspektorat
49	PD Pasar (BTS)
50	DPMPTSP
51	Diskominfostandi
52	RSUD
53	Satpol PP (Satpol PP Kayumanis)
54	Puskesmas Tanah sareal
55	Puskesmas Bogor Selatan
56	Puskesmas Bogor Timur
57	Puskesmas Bondongan
58	Puskesmas Bogor Tengan
59	Puskesmas Bogor Utara
60	Puskesmas Gang Aut
61	Kelurahan Sindang Rasa
62	Kelurahan Sindang Sari
63	Kelurahan Tajur

No	Titik FO
64	Kelurahan Cibuluh
65	Kelurahan Ciparigi
66	Kelurahan Kedung Halang
67	Kelurahan Harjasari
68	Kelurahan Muarasari
69	Kelurahan Pakuan
70	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
71	Satpol PP Padjajaran
72	Kelurahan Ciluar
73	Kelurahan Bondongan
74	Kelurahan Menteng
75	Kelurahan Lawang Gintung
76	Kelurahan Gudang
77	Kelurahan Curug Mekar
78	Kelurahan Kebon Pedes
79	Kelurahan Loji
80	Kelurahan Genteng
81	Kelurahan Baranangsiang
82	Kelurahan Sempur
83	Kelurahan Ciwaringin
84	Puskesmas Cipaku
85	Kelurahan Pamoyanan
86	Kelurahan Tanah Baru
87	Kelurahan Sindang Barang
88	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Aparatur (gedung baru)
89	Kelurahan Sukaresmi
90	Gedung DPRD
91	Rumah Dinas Wali Kota
92	Bappeda Kota Bogor
93	Dinas Nakertrans Kota Bogor

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase CCTV yang diintegrasikan	96%	100%	104%

Dalam rangka mewujudkan Misi Kota Bogor untuk menjadikan Bogor Kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi, penerapan teknologi pemantauan kondisi kota menggunakan CCTV merupakan hal yang penting. CCTV yang dipasang di lingkungan Kota Bogor bertujuan untuk melaksanakan pemantauan secara real time sehingga diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi warga Kota Bogor.

Untuk menunjang layanan CCTV diperlukan jaringan yang terintegrasi, media penyimpanan, media analitic, monitor, serta aplikasi integrasi. Saat ini CCTV Kota Bogor dapat diintegrasikan di Aplikasi SIMATA yang terdapat di Bogor Green Room.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor sampai dengan tahun 2019 sudah melakukan pemasangan serta pemeliharaan perangkat CCTV terintegrasi sebanyak 60 (enam puluh) unit CCTV di lingkungan Balaikota dan Luar Balaikota Bogor, dan terintegrasi.

Tujuan 1.1. : Peningkatan kualitas *smart government*

Sasaran 1.1.3 : Meningkatnya integrasi data sistem informasi

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Integrasi Data SIM	20,39%	20,59%	101%

Integrasi data merupakan kemampuan sebuah aplikasi atau sistem untuk dapat berbagi data dengan aplikasi/sistem lain demi mewujudkan peningkatan kualitas data dan efisiensi kinerja perangkat daerah. Proses integrasi sistem ini dilakukan melibatkan beberapa kegiatan di antaranya pengembangan datawarehouse kota bogor sebagai gudang datanya dan pengembangan aplikasi SIMATA sebagai media penampil hasil olahan datanya.

Sampai dengan tahun 2019, Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Bogor telah mengintegrasikan sebanyak 21 (dua puluh satu) SIM dari 40 (empat puluh) SIM total aplikasi yang dapat diintegrasikan, sebesar 20,59% (dua puluh koma lima sembilan persen) dari total seluruh Aplikasi yang terdapat di Kota Bogor.

Sampai dengan tahun 2019 telah dilakukan integrasi pada SIM berikut :

1. SIMPEG terintegrasi dengan simata.kotabogor.go.id;
2. Aplikasi SIMPUS terintegrasi dengan <http://172.16.0.64/dashboard>;
3. Aplikasi SIM Wilayah terintegrasi dengan <http://172.16.0.64/dashboard>;
4. Aplikasi SMART terintegrasi dengan simata.kotabogor.go.id;
5. Aplikasi SIL terintegrasi dengan simata.kotabogor.go.id;
6. Aplikasi SIDAMENDEL terintegrasi dengan Eksotik;
7. Aplikasi LKPP terintegrasi dengan Eksotik;
8. Aplikasi WEB Aspirasi terintegrasi dengan simata.kotabogor.go.id;
9. Aplikasi e-Surat terintegrasi;
10. Aplikasi Hibah Bansos terintegrasi (SAHABAT);
11. Aplikasi BAPPEDA terintegrasi dengan simata.kotabogor.go.id;
12. Aplikasi SIMRAL terintegrasi;
13. Aplikasi SIM PERINDAG terintegrasi;
14. Aplikasi SIM PATEN terintegrasi dengan SIM Wilayah;
15. Aplikasi SISLAPPBJ terintegrasi dengan simata.kotabogor.go.id;
16. Aplikasi SIM PBB terintegrasi;
17. Aplikasi Datawarehouse terintegrasi;
18. Aplikasi SIPDEH terintegrasi dengan SIMRAL;
19. SIM PBB terintegrasi dengan SIMRAL;
20. SIM BPHTB terintegrasi dengan SIMRAL;
21. Integrasi ASB (Analisis Standar Belanja).

MISI 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Governance* dalam meningkatkan mutu pelayanan publik.

Tujuan 2.1. : Pengembangan dan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dalam mendukung Keterbukaan Informasi Publik

Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya pelayanan informasi dan komunikasi

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase layanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah terkait	70%	80,14%	114%

Layanan pengaduan masyarakat adalah aplikasi aspirasi online sebagai sarana untuk masyarakat Kota Bogor menyampaikan atau melayangkan aspirasi, saran, kritik, pengaduan, pertanyaan dan ketidakpuasan masyarakat atas layanan yang diberikan Pemerintah Kota Bogor kepada masyarakat.

Layanan pengaduan masyarakat pada tahun 2019 telah terintegrasi melalui Aplikasi SiBadra. Jenis pengaduan yang disampaikan bersifat umum, misalnya jalan rusak, gedung sekolah rusak, permintaan data, tuiuan wisata, rumah sakit, alamat kantor pemerintah, dan lain-lain.

Jumlah pengaduan yang diterima selama tahun 2019 sebanyak 2326 (dua ribu tiga ratus dua puluh enam) pengaduan, yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 1720 (seribu seratus delapan puluh delapan) atau 73% (tujuh puluh tiga persen) dan yang belum mendapat tindaklanjut sebanyak 606 (enam ratus enam) atau 27% (dua puluh tujuh persen).

Berikut data rekap laporan pengaduan masyarakat 10 (sepuluh) teratas melalui Aplikasi SiBadra selama tahun 2019:

LAPORAN PENGADUAN SIBADRA

Laporan 10 OPD Teratas

No	OPD	Status					Total
		Selesai Bersyarat	Tidak Valid	Selesai	Dalam Proses	Verifikasi	
1	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	17	2	151	18	291	479
2	Dinas Perumahan & Permukiman	39	1	256	13	83	392
3	Dinas Perhubungan	1	1	325	0	6	333
4	Perusahaan Daerah Air Minum	54	1	87	133	1	276
5	Satuan Polisi Pamong Praja	12	0	104	6	31	153
6	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	2	1	128	0	5	135
7	Dinas Lingkungan Hidup	4	1	98	9	18	130
8	Dinas Kesehatan	1	1	31	31	13	77
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	1	32	0	0	34
10	Dinas Komunikasi & Informatika	1	3	12	2	11	29

Laporan 10 Kelurahan Teratas

No	OPD	Status					Total
		Selesai Bersyarat	Tidak Valid	Selesai	Dalam Proses	Verifikasi	
1	Paledang	2	4	73	4	18	101
2	Baranangsiang	2	2	54	7	26	91
3	Sindangsari	3	2	50	2	27	84
4	Menteng	3	4	36	4	27	74
5	Kedungwaringin	4	3	26	11	27	71
6	Tegallega	3	5	31	7	24	70
7	Pabaton	5	3	38	3	18	67
8	Kedung Badak	4	1	36	4	21	66
9	Kebon Pedes	2	1	26	9	22	60
10	Tegal Gundil	3	3	37	3	13	59

Tujuan 2.2. : Peningkatan Manajemen Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional

Sasaran 2.2.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Akuntabilitas kinerja Dinas	B	BB	
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor diperoleh berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja.

Untuk setiap hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan ditindaklanjuti sesuai arahan dalam rekomendasi evaluasi kinerja.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam struktur keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib bukan pelayanan dasar dibidang komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian.

Lebih lanjut pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor tahun 2019 yang telah ditetapkan, dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam APBD, baik yang dialokasikan pada Anggaran Belanja Langsung maupun Anggaran Belanja Tidak Langsung.

Secara keseluruhan target belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor tahun 2019 setelah Anggaran Perubahan sebesar Rp18.390.826.293,00 (delapan belas milyar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, terealisasi Rp17.693.168.805,00 (tujuh belas milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah) atau 96,21% (sembilan puluh enam koma dua satu persen) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Target **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp8.520.586.704,00 (delapan milyar lima ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah) terealisasi Rp7.952.944.046,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat puluh enam rupiah) atau 93,34% (sembilan puluh tiga koma tiga empat persen);

- b. Target **Belanja Langsung** sebesar Rp9.870.239.589,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) terealisasi Rp9.740.224.759,00 (sembilan milyar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) atau 98,68% (sembilan puluh delapan koma enam delapan persen).

Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Belanja Tidak Langsung	8.520.586.704	7.952.944.046	93,34%
Belanja Langsung	9.870.239.589	9.740.224.759	98,68%
Jumlah	18.390.826.293	17.693.168.805	96,21%

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor merupakan dokumen yang menggambarkan pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor selama tahun 2019 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja tahun 2019.

Dari 5 (lima) sasaran yang akan dicapai dengan target indikator yang telah ditetapkan semuanya telah diukur dan dievaluasi capaiannya seperti yang telah dijabarkan dalam laporan ini. Pencapaian itu dihasilkan melalui perhitungan antara persentase nilai capaian dengan indikator kinerja sasaran.

Sasaran yang telah dicapai dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan operasional untuk mencapai tujuan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian dengan meliputi layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta layanan pengaduan dan aspirasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai langkah awal menuju Bogor sebagai *Smart City*.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor tahun 2019 yang dapat kami sampaikan. Semoga laporan ini bisa menjadi evaluasi bersama atas pencapaian sasaran kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor Tahun 2015-2019 sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja tahun 2019 dan dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih baik di tahun anggaran selanjutnya untuk pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor.